



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULI MURPUJI ASTUTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 273655

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 485.000.000

1. Tanah Seluas 968 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp.
485.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 310.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
253.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 36.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 65.035.951

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 896.435.951

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 896.435.951

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.